

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman. 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. PT. Media Saran. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Konpress. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah: Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum dan Kesatuan*. Setara Press. Malang.
- Galtung, Johan. 2003. *Kekerasan Kultural*. Jurnal Ilmu Sosial. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1984. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Ndra, Talizidihu. 1997. *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2008. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Purwadarminto, WJS. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Rauf, Mawardi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penyelajahan Teoritis*. Direktorat Jenderal Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Subarno, Hari. 2008. *Memandu Otonomi Daerah Menuju Kesatuan Bangsa (Cetakan Kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta.

Soedjito, Irawan. 1981. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Bina Aksara . Jakarta.

Syaukani, HR. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Yudhoyono, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur PEMDA & Anggota DPRD*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Yuswanto. 2012. *Hukum Desentralisasi Keuangan*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya II Metro.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk.

## **WEBSITE**

<http://cahwaras.wordpress.com/2010/04/25/keputusan-menteri-dalam-negeri-nomor-42-tahun-2001-tentang-pedoman-pelaksanaan-penyerahan-barang-dan-hutang-piutang-pada-daerah-yang-baru-dibentuk>.

<http://pascaunair/dinamika-dinamika-konflik-sosial-dalam-masyarakat>